



Faktor-faktor Pendukung Pencegahan *Fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat

Gine Das Prena*, Reynaldi Mulyana Kusmawan

Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Kota Denpasar, Bali, Indonesia

*(ginedasfrena@undiknas.ac.id)

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
2 April 2020

Tanggal diterima:
19 Mei 2020

Tanggal dipublikasi daring:
25 Juni 2020

Kata kunci: *good corporate governance; kesadaran anti-fraud; pencegahan fraud; risk based internal audit; whistleblowing system;*

Pengutipan:

Prena, G. D. & Kusmawan, R. M. (2020). Faktor-faktor Pendukung Pencegahan *Fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5 (1), 84-105

Keywords: *anti-fraud awareness; fraud prevention; good corporate governance principles; risk based internal audit; whistleblowing system*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pemahaman *risk based internal audit, whistleblowing system, kesadaran anti-fraud*, dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang disebar menggunakan kuesioner. Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah auditor internal dan direksi yang berasal dari 134 Bank Perkreditan Rakyat dan sampel yang didapat melalui metode *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah auditor dari 57 Bank Perkreditan Rakyat. Melalui analisis kuantitatif menggunakan SPSS analisis linier berganda t-test menunjukkan *risk based internal audit, whistleblowing system, kesadaran anti-fraud* dan *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh positif pada pencegahan *fraud*.

ABSTRACT

This study aims to determine whether the understanding of Risk Based Internal Audit, Whistleblowing System, anti-fraud awareness, and the application of the principles of Good Corporate Governance affect the prevention of fraud in Rural Credit Banks in Bali Province. This study uses primary data sources, using instruments in the form of questionnaires. The population used in this study were auditor internal and board of directors from 134 Rural Credit Banks and the sample used was auditor internal from 57 Rural Credit Banks taken purposive sampling. The analytical method used is quantitative analysis that is multiple linear analysis using SPSS test equipment. t test results show that Risk Based Internal Audit, Whistleblowing System, Anti-Fraud awareness, and the application of the principles of Good Corporate Governance each have a positive effect on Fraud prevention.

PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan yang berbentuk tabungan, deposito berjangka, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dan usaha utama BPR sebagai penyalur dana (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Dengan lokasi yang dekat dengan masyarakat yang sangat membutuhkan dana, BPR memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, yaitu peningkatan pembiayaan usaha bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, (UMKM), karena selama ini UMKM sangat membutuhkan dana dari pihak luar (Azriani, Harianto, & Nuryantono, 2008). BPR memiliki tujuan umum yaitu untuk membantu pembangunan perekonomian nasional dalam rangka pemerataan perekonomian, stabilitas perekonomian dan pertumbuhan perekonomian kearah peningkatan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat pedesaan, serta membantu pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM).

Dewasa ini, banyak BPR di Indonesia yang mengalami likuidasi. BPR yang izin usahanya dicabut disebabkan karena *Fraud* hampir sebanyak 70% (Bank Indonesia,

2011). Selain itu menurut Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perparindo), 81% dari jumlah BPR melakukan tindak *fraud*. Bank Indonesia melakukan investigasi pada tahun 2013 terhadap dugaan tindak pidana Perbankan yang terjadi di Bank Umum maupun BPR di Indonesia. Dari kasus yang telah di investigasi tersebut, aktivitas perkreditan atau korupsi dana kredit yang paling mendominasi. Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat luas, BPR seharusnya tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas tersebut. Namun fakta yang terjadi dilapangan banyak BPR yang melakukan *Fraud*. *Fraud* yang terjadi baik pada BPR maupun Bank Umum didominasi oleh pemberian deposito fiktif, pemberian kredit fiktif, penggelapan dana angsuran kredit, rekayasa pemberian kredit, hingga penggelapan hasil penjualan. Perilaku seseorang ditentukan oleh intensinya. Sementara itu, intensi merupakan fungsi dari dua faktor penentu, yaitu sifat kepribadian seseorang (yang disebut sikap) dan pengaruh sosial (yang disebut norma subjektif) (Suryono & Chariri, 2016). BPR memiliki kecendrungan lebih berisiko bermasalah jika dibandingkan dengan Bank Umum sebab jumlah BPR

secara kuantitas lebih banyak dengan permodalan yang lebih terbatas (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Beberapa faktor dapat mendorong perburukan kinerja BPR yang pada beberapa kasus berujung pada pencabutan izin usaha. Beberapa BPR yang tercabut izin usaha buka hanya karena ketidak mampuan BPR tersebut menghadapi persaingan, tetapi tidak jarang kehancuran tersebut harus dihadapi BPR karena terjadinya *fraud* yang beberapa diantaranya justru dilakukan oleh pengurus BPR itu sendiri. Penerapan *good corporate governance* dan manajemen resiko yang baik tidak hanya menghindarkan BPR dari potensi kecurangan tetapi juga akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan BPR itu sendiri (Rudi, 2017).

Penelitian tentang pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas aparat, menyatakan variabel bebas tersebut berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap pencegahan *fraud* (Wardana, Sujana, & Wahyuni, 2017). Penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan *risk based internal audit* terhadap pencegahan *fraud* lainnya menyatakan bahwa pelaksanaan *risk based internal audit* perbengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada audit internal

Kantor Inspeksi Bank BRI wilayah Bandung (Jannah, 2016).

Tindakan *fraud* dalam penyajian laporan keuangan penting menjadi fokus perbaikan manajemen agar kegiatan ini dapat dihilangkan dan tidak menyebabkan kehancuran internal. Namun, pendeteksian terhadap *financial statement fraud* tidak selalu mendapatkan titik terang karena berbagai motivasi yang mendasarinya serta banyaknya metode untuk melakukan *financial statement fraud* (Alexander & Cumming, 2020).

Berbagai bentuk *fraud* apalagi jika dilakukan secara bersamaan ataupun dalam kondisi terorganisasi seringkali membawa dampak tidak saja bagi orang-orang yang berada dalam BPR tetapi juga pihak eksternal entitas dalam hal ini masyarakat. Tindakan *fraud* akan dapat tertangani hanya jika ada orang atau pihak tertentu yang berani membuka dan menentang tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi *stakeholder* terutama masyarakat. Pihak atau orang yang berani membongkar atau mengungkap tindakan kecurangan tersebut dikenal sebagai seorang *whistleblower*.

Terdapat beberapa tindakan yang diduga mampu untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan di suatu instansi, sebagai bagian dari

penguatan *good corporate governance* yang dilaksanakan suatu entitas adalah penerapan *whistleblowing system* (sistem pengaduan), selain juga tetap menanamkan keberadaan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Penekanan terhadap keberadaan prinsip-prinsip *good corporate governance* selanjutnya akan menjadi landasan dan pondasi yang kuat bagi etika karyawan perusahaan dengan pengetahuan akan etika dan konsep *good corporate governance* diharapkan akan menjadi landasan kuat bagi keberadaan etika dan tata kelola perusahaan yang selanjutnya akan menjadi pembentuk pola kesadaran *antifraud* bagi keseluruhan karyawan BPR.

Kesesuaian antara penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, *whistleblowing system* disertai dengan penguatan pengetahuan tentang *risk based internal audit* serta penumbuhan sikap kesadaran *anti-fraud* organisasi secara komprehensif diharapkan membawa suatu dampak positif bagi pencegahan *fraud* terutama bagi entitas yang memiliki akses kuat bagi masyarakat selaku stakeholder. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, apakah pemahaman *risk based internal audit*, *whistleblowing system*, kesadaran

anti-fraud, dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman *risk based internal audit*, *whistleblowing system*, kesadaran *anti-fraud*, dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan fraud pada Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali.

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Fraud Triangle Theory

Fraud Triangle Theory adalah teori yang membahas terkait dengan dorongan-dorongan yang menyebabkan orang melakukan kecurangan. Teori ini digagas oleh Donald R. Cressey (1953). Penelitian Cressey menarik hipotesis dari 200 orang yang dihukum karena melakukan *fraud* berupa penggelapan. Hipotesa Cressey inilah yang kemudian berkembang menjadi dasar pemikiran mengapa orang melakukan *fraud*. Hipotesis Cressey dikenal sebagai *Fraud Triangle* dan digunakan oleh banyak organisasi untuk menggambarkan faktor-faktor penyebab *fraud*.

Terdapat tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan menurut Cressey yaitu, tekanan, peluang dan rasionalisasi. Tekanan akan menyebabkan situasi dimana seseorang atau sekelompok orang terdorong untuk melakukan kecurangan. Tekanan ini bisa disebabkan karena sifat serakah, kebutuhan keluarga yang harus segera dipenuhi, ketidakpuasan karyawan terhadap dunia kerjanya dan lain-lain). Peluang adalah kondisi dimana seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan. Biasanya peluang ini muncul karena lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan. Peluang juga bisa berawal dari tekanan atau dorongan dari dalam diri seseorang sehingga mencari peluang untuk melakukan kecurangan tersebut.

Rasionalisasi yaitu pikiran seseorang yang membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukannya. Pikiran ini biasanya muncul karena ia melihat orang lain dalam organisasinya melakukan kecurangan namun mereka tidak mendapat hukuman dari perbuatannya tersebut.

Risk Based Internal Audit

Risk Based Internal Audit merupakan pendekatan manajemen

resiko yang telah mendapat persetujuan komisaris atau direksi dan selanjutnya diterapkan di seluruh jenjang organisasi untuk mengendalikan resiko sampai batas yang dapat diterima (Wardani & Sulhani, 2017). Dalam konsep audit berbasis resiko, semakin tinggi audit suatu area, maka harus semakin tinggi pula perhatian dalam audit area tersebut. Tujuan dari *risk based internal audit* diantaranya adalah untuk mengurangi resiko, mengantisipasi resiko, dan melindungi bank.

Whistleblowing System

Whistleblowing System merupakan suatu wadah atau aplikasi untuk melaporkan pelanggaran. *Whistleblowing System* yang diterapkan pada pemerintahan dan diperusahaan pada umumnya memiliki perbedaan. *Whistleblowing System* pada pemerintah memiliki aplikasi tersendiri yang bernama *WiSe*, sedangkan pada perusahaan umumnya setiap perusahaan memiliki aplikasinya tersendiri. *Whistleblowing system* banyak memberikan manfaat. *Whistleblowing* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh

perusahaan atau atasannya kepada pihak lain (Miller, 2017).

Whistleblowing pada umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*). Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008).

Kesadaran Anti-Fraud

Kesadaran *anti-fraud* merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya upaya pencegahan kecurangan oleh semua pihak dalam organisasi. Kesadaran *anti-fraud* yang efektif selanjutnya akan memperkuat kontrol organisasi hirarkis dan menurunkan *fraud* dalam organisasi (Zarefar & Arfan, 2017).

Menurut *Statement on Auditing Standard* mengungkapkan dimensi pengukuran yang digunakan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan, antara lain menciptakan dan memelihara budaya kejujuran dan etika yang tinggi, melaksanakan evaluasi atas proses *anti-fraud* dan pengendalian, serta mengembangkan proses pengawasan yang memadai (Sari & Laksito, 2014).

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan sebagai tata cara kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stakeholder*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Indonesia mulai menerapkan konsep GCG sejak menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah percantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKKG) berpendapat bahwa perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab yang menerapkan standar GCG yang telah diterapkan standar internasional (Adrian, 2011). Jika suatu entitas tidak sesuai dengan etika dan ilegal, maka penerapan *system good corporate governance* dapat menjadi momok yang ditakuti, karena jika suatu saat tindakan tidak beretika dan ilegal diketahui pihak-pihak tertentu, maka akan merusak reputasi, kepercayaan dan bahkan dapat menyebabkan kerugian pada entitas tersebut (Setianto, Utami, & Novianti, 2016).

Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh semua pihak dalam mengurangi penyebab terjadinya *fraud* dapat ditekan yaitu melalui suatu upaya. Adapun upaya tersebut meminimalisir peluang (*opportunity*) terjadinya *fraud*, mengurangi tekanan (*pressure*) pada setiap struktur perusahaan agar mampu memenuhi kebutuhannya, mengeliminasi munculnya rasa rasionalisasi (*rationalization*) yang memunculkan alasan pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan (Albrecht, Albrecht, & Zimbelman, 2012).

Dorongan untuk pencegahan *fraud* dan keinginan untuk mengungkap kecurangan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan (Indriani, Yulia, Nadirsyah, & Ariska, 2019). Karyawan yang peduli dengan kode etik perusahaannya. Sehingga lebih memungkinkan untuk memberikan pengaduan terkait dengan tindakan tidak etis (Mayasari, Setiyanto, & Irawati, 2019).

Pengaruh Pemahaman *Risk Based Internal Audit* terhadap Pencegahan *Fraud*

Risk Based Internal Audit merupakan audit yang dilakukan dengan lebih memfokuskan dan

memberikan prioritas terhadap resiko bisnis dan proses pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi tersebut. Penerapan *risk based internal audit* yang baik akan mengakibatkan kenaikan pencegahan *fraud* (Wardani & Sulhani, 2017).

Pelaksanaan *risk based internal audit* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* (Dewi, Rozali, & Mohammad, 2015) dalam Studi Kasus yang diselenggarakan pada Audit Internal Kantor Inspeksi Bank BRI Wilayah Bandung. Hal senada juga diungkap dalam penelitian pada Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia (Suginam, 2017). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis satu dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₁: Pemahaman *risk based internal audit* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

Hubungan antara *Whistleblowing System* dan Pencegahan *Fraud*

Whistleblowing System adalah bagian dari pengendalian perusahaan dalam mencegah bentuk-bentuk kecurangan, maka hal ini menjadi masalah kepengurusan perusahaan. Dengan demikian kepemimpinan dalam penyelenggaraan *whistleblowing system* disarankan berada pada Direksi, khususnya Direktur Utama (Tuanakotta, 2013). *Whistleblowing* juga dapat didefinisikan sebagai

upaya anggota saat ini atau masa lalu dari suatu organisasi untuk memberikan peringatan kepada *top management* (Saud, 2016). *Whistleblowing* sebagai suatu pengungkapan yang dilakukan anggota organisasi atas suatu praktik ilegal atau tanpa legitimasi hukum di bawah kendali pimpinan mereka kepada individu atau organisasi yang dapat menimbulkan efek tindakan perbaikan (Sofia, Herawati, & Zuhdi, 2013).

Hubungan *whistleblowing system* dengan pencegahan *fraud* mengacu pada penelitian Libramawan (2014) yang menyatakan bahwa penerapan *whistleblowing system* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian dengan hasil sejenis yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng juga diungkap oleh Wardana et al. (2017). Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa ketika penerapan *whistleblowing system* semakin tinggi, maka pencegahan *fraud* juga semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dua dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₂: *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

Pengaruh Kesadaran *Anti-Fraud* terhadap Pencegahan *Fraud*

Kesadaran *anti-fraud* merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya upaya pencegahan kecurangan oleh semua pihak dalam organisasi. Dengan kepemimpinan yang baik serta memiliki kesadaran untuk menumbuhkan *anti-fraud* yang tinggi diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian semua pihak dalam organisasi terhadap pencegahan kecurangan.

Sari & Laksito (2014) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran *anti-fraud* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Jannah (2016) dengan penelitiannya pada BPR di kota Surabaya. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis tiga dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₃: Kesadaran *anti-fraud* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan *Fraud*

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan atau organisasi yang baik. Penerapan *good corporate governance*, selain menghindarkan BPR dari potensi

fraud, juga dapat meningkatkan kinerja keuangan BPR. Mengacu pada penelitian Jannah (2016) yang menyatakan terdapat pengaruh positif *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada BPR di Surabaya serta Nadia, Sukarmanto, & Purnamasari (2018) bahwa terdapat pengaruh positif *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *Fraud* pada PT Tondano Jaya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis empat dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₄: Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* positif terhadap pencegahan *fraud*

METODE

Objek Penelitian

Peneliti mencoba menguji pengaruh Pemahaman *Risk Based Internal Audit*, *Whistleblowing System*, Kesadaran *anti-fraud* serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud* dengan mengambil Lokasi penelitian pada Bank Perkreditan Rakyat yang berada di Provinsi Bali. Adapun peneliti memilih BPR karena BPR masih rawan akan terjadinya kecurangan dan BPR lebih cenderung berisiko terkena permasalahan (*probability of default*) bila dibandingkan dengan bank umum.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh dewan direksi dan internal auditor BPR yang berada di Provinsi Bali yang berjumlah 134. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* didapat bahwa terdapat 57 BPR yang memiliki susunan direksi sekaligus memiliki *internal auditor* sehingga total sample yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 57 sampel.

Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah jenis data kuantitatif. Adapun data yang diperoleh seperti, jawaban responden pada kuesioner.

Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, ini menggunakan data primer. Data primer ini didapat dari data yang dikumpulkan dari kuesioner.

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data di penelitian ini berupa kuesioner (Dewi et al., 2015) tentang Pemahaman *Risk Based Internal Audit*, *Whistleblowing System*, Kesadaran *anti-fraud* serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan pencegahan *fraud*. Kuesioner ini diukur menggunakan skala *Likert*.

Skala *likert* merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Penelitian ini menggunakan sejumlah *statement* 1-5 yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Metode Analisis Data

Perhitungan analisa dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan *software SPSS* Analisis regresi linear berganda untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel regresi yang memiliki satu variabel terikat dua atau lebih variabel bebas. Selain itu untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikatnya.

Responden dari penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut: jenis kelamin responden perempuan lebih banyak dari pada responden laki-laki, yaitu sebanyak 30 orang (52,6%) dan laki-laki sebanyak 27 orang (27,4%). Umur responden dikelompokkan menjadi empat yaitu dibawah 25 tahun, 25 sampai dengan 35 tahun, 36 sampai dengan 45 tahun, dan diatas 45 tahun. Responden paling banyak berusia 25 sampai 35 tahun yaitu

sebanyak 26 orang (45,6%) dan responden paling sedikit yaitu berumur dibawah 25 tahun yaitu sebanyak empat orang (7%). Kemudian umur 36-45 tahun sebanyak 11 orang (19,3%), dan diatas 45 tahun sebanyak 16 orang (28,1%).

Kemudian dilihat dari latar belakang Pendidikan sebagian besar responden memiliki latar belakang S1, yaitu sebanyak 40 orang (70,2%), Diploma sebanyak 10 orang (17,5%), berpendidikan S2 sebanyak tujuh orang (12,3%). Ditinjau dari pengalaman kerja, responden paling banyak adalah pengalaman kerja kurang dari lima tahun sebanyak 19 orang (33,3%) dan responden yang paling sedikit yaitu pengalaman kerja 11 sampai 15 tahun sebanyak delapan orang (14%), kemudian diatas pengalaman kerja 15 tahun sebanyak 16 orang (28,1%) dan pengalaman kerja lima sampai 10 tahun sebanyak 14 orang (24,6%).

Kriteria responden berdasarkan latar belakang pendidikan, responden paling banyak adalah latar belakang pendidikan akuntansi sebanyak 33 orang (57,9%) dan responden paling sedikit adalah latar belakang pendidikan perbankan sebanyak satu orang (1,8%), kemudian latar belakang pendidikan manajemen delapan orang (14%), latar belakang

pendidikan sistem Informasi sebanyak dua orang (3,5%), dan 13 (22,8%) responden berasal dari latar belakang pendidikan lain-lain.

Semua instrumen penelitian memiliki nilai *alpha cronbach* >0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwasemua variabel tersebut reliabel. Bagi kepentingan uji validitas seluruh instrumen dalam pertanyaan (kuesioner) memiliki nilai nilai *r* hitung bernilai lebih besar (>) dari nilai *r* tabel =0,3 Dengan demikian seluruh instrumen penelitian yang digunakan adalah valid selanjutnya instrument-instrument tersebut dapat digunakan untuk menganalisis statistik lebih lanjut. Selanjutnya terdapat 4 (empat) teknik analisis yaitu: 1) Uji Asumsi Klasik, 2) Analisis Statistik Deskriptif, 3) Analisis Regresi Linier Berganda, dan 4) Uji Hipotesis. Seluruh teknik uji ini akan saling berhubungan hingga nantinya mendapatkan hasil akhir dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Adapun deskripsi data meliputi nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum setiap variabel penelitian dapat dilihat pada statistik deskriptif pada Tabel 1.

Hasil Uji Normalitas

Berikut hasil dari uji normalitas yang tercantum pada tabel 2 Deskripsi data meliputi nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* setiap variabel penelitian. Berdasarkan pada hasil tabel tersebut, nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,200 yang lebih besar (>) dari 0,05. Hal itu berarti residual data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Adapun deskripsi data meliputi nilai *VIF (Variance Inflation Factor)* setiap variabel penelitian dapat dilihat pada hasil yang tersaji dalam Tabel 3. Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai *tolerance* berturut-turut sebesar 0,591; 0,591; 0,429, 0,616, yang kesemuanya lebih besar dari 10 persen (0,10), dan nilai *VIF* sebesar 1,691 ; 1,691 ;2,331; 1,623 yang kesemuanya lebih kecil (<) dari 10. Hal ini berarti data tersebut lolos uji multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Indikator untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas dapat diketahui dengan menggunakan uji statistik *Glejser*.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan (Y)	60	-0,03	0,18	0,0740	0,05059
ICP (X ₁)	60	1,66	12,48	4,2258	2,54140
IOS (X ₂)	60	-0,32	0,05	-0,2550	0,08523
Valid N (listwise)	60				

Tabel 2. Hasil Uji KS One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		57
Normal	Mean	0,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1,50373259
Most Extreme	Absolute	0,086
Differences	Positive	0,069
	Negative	-0,086
Test Statistic		0,086
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Tabel 3. Nilai Tolerance dan VIF Coefficients

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Risk Based Internal Audit	0,591	1.691
Whistleblowing System	0,591	1.691
Kesadaran Anti-Fraud	0,429	2.331
Prinsip-prinsip GCG	0,616	1.623

Bila nilai signifikansi variabel bebas terhadap nilai *absolute residual statistic* di atas $\alpha = 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil pada uji ini dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil uji Gletser diperoleh nilai signifikansi variabel RBIA sebesar 0,549, variabel *whistle-*

blowing system sebesar 0,287, variabel kesadaran anti-*fraud* sebesar 0,513, prinsip-prinsip GCG sebesar 0,671, semua nilai sig pada keempat variabel bebas lebih besar (>) dari 0,05. Hal ini berarti model regresi tersebut tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Glejser Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,150	2,098		0,072	0,943
Risk Based Internal Audit	-0,030	0,050	-0,106	-0,603	0,549
Whistleblowing System	0,067	0,062	0,189	1,077	0,287
Kesadaran Anti-Fraud	0,037	0,056	0,136	0,658	0,513
Prinsip-prinsip GCG	-0,036	0,085	-0,073	-0,427	0,671

a. Dependent Variable: ABS_Res

Tabel 5. Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	-3,144	3,371
Risk Based Internal Audit	0,190	0,080
Whistleblowing System	0,382	0,100
Kesadaran Anti-Fraud	0,265	0,089
Prinsip-prinsip GCG	0,340	0,137

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini diolah dengan software *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) versi 23 pengaruh pemahaman *risk basek internal audit*, *whistleblowing system*, kesadaran *anti-fraud*, dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada BPR di Provinsi Bali, dapat dianalisis menggunakan perhitungan regresi linier berganda. Berdasarkan Tabel 5

diperoleh suatu persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y &= \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 \\
 &= -3.144 + 0,190X_1 + 0,382X_2 + \\
 &\quad 0,265X_3 + 0,340X_4
 \end{aligned}$$

Hasil Analisis Determinasi (R²)

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi *risk based internal audit* (X1), *whistleblowing system* (X2), kesadaran *anti-fraud* (X3), prinsip-prinsip *good corporate governance*

Tabel 6. Koefisien Determinasi Model Summary

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,863 ^a	0,745	0,725	1,560

a. Predictors: (Constant), RBIA, W, System, K. *Anti-fraud*, Prinsip GCG

Tabel 7. Uji Simultan F ANOVA^a

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>Regression</i>	369.302	4	92.325	37.914	0,000 ^b
<i>Residual</i>	126.628	52	2.435		
<i>Total</i>	495.930	56			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

b. Predictors: (Constant), RBIA, W, System, K. *Anti-fraud*, Prinsip GCG

(X4), terhadap Pencegahan *Fraud* (Y) dinyatakan dalam persentase, dengan rumus $D = R^2 \times 100\%$. Hasil dari kalkulasi koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 6.

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh besarnya koefisien determinasi sebesar 0.745 atau 74,5%. Hal ini menunjukkan penerapan *risk based internal audit* (X1), kualitas *whistleblowing system* (X2), kesadaran *anti-fraud* (X3), dan implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* (X4) memberikan kontribusi terhadap naik turunnya kualitas pencegahan *Fraud* (Y) sebesar 74,5%. Sisanya (100% - 74,5% = 25,5%) disebabkan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Hasil Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji F)

Sebelum menguji hipotesis maka perlu terlebih dahulu kelayakan model (model fit) yang dilakukan dengan uji F untuk mengetahui pengaruh keempat variabel bebas secara serempak terhadap variabel terikat. Jika hasil dari uji F adalah signifikan, maka artinya keempat variabel bebas mempengaruhi secara simultan variabel terikat dan model yang digunakan dianggap layak uji sehingga pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan.

Berdasarkan Tabel 7 yaitu uji ANOVA atau F-test diperoleh nilai F hitung sebesar 37,914 dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu *risk based*

Tabel 8. Uji Parsial t

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.144	3.371		-0,932	0,355
<i>Risk Based Internal Audit</i>	0,190	0,080	0,217	2.387	0,021
<i>Whistleblowing System</i>	0,382	0,100	0,348	3.824	0,000
Kesadaran <i>Anti-Fraud</i>	0,265	0,089	0,318	2.971	0,004
Prinsip-prinsip GCG	0,340	0,137	0,222	2.491	0,016

internal audit (X1), *whistleblowing system* (X2), kesadaran *anti-fraud* (X3), prinsip-prinsip good corporate governance (X4), terdapat pengaruh secara simultan terhadap Pencegahan *Fraud* (Y) pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, maka model dianggap layak uji dan pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan.

Hasil Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui model regresi variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Tingkat signifikansi yang digunakan 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan kriteria pengujian apabila signifikansi t-hitung lebih kecil dari 0,05 berarti variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) dan sebaliknya apabila signifikansi t hitung lebih besar dari 0,05 berarti variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan Tabel 8 yaitu uji regresi parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel *risk based internal audit*, *whistleblowing system*, kesadaran *anti-fraud* masing-masing mempengaruhi Pencegahan *Fraud* secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi *Risk Based Internal Audit* sebesar 0,021 ($\text{sig} < 0,05$), *Whistleblowing System* sebesar 0,000 ($\text{sig} < 0,05$), Kesadaran *Anti-Fraud* sebesar 0,004 ($\text{sig} < 0,05$), dan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebesar 0,016 ($\text{sig} < 0,05$).

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pemahaman Risk Based Internal Audit terhadap Pencegahan Fraud

Risk based internal audit atau audit internal berbasis resiko adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada resiko bisnis dan proses pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Dalam konsep

audit berbasis resiko, semakin tinggi suatu area, maka harus semakin tinggi pula perhatian dalam audit area tersebut. Untuk mengidentifikasi suatu resiko bisnis, auditor harus memahami aspek pengendalian dan bisnis yang bersangkutan.

Pemahaman terhadap proses bisnis termasuk memahami resiko dan pengendalian dari system dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi. Penelitian Dewi et al. (2015) yang menyatakan terdapat pengaruh positif Pengaruh Pelaksanaan *Risk Based Internal Auditing* terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus pada Audit Internal Kantor Inspeksi Bank BRI Wilayah Bandung). Serta penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh yang menunjukkan bahwa *risk based internal auditing* telah terbukti berpengaruh terhadap deteksi risiko operasional audit jaringan kantor.

Berdasarkan Tabel 8, besar nilai t hitung variabel *risk based internal audit* dengan nilai $\text{sig } 0,021 < \alpha (0,05)$ hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama yang diterima dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial variabel *risk based internal audit* (X1) terhadap pencegahan *fraud*. Dengan kata lain apabila *risk based internal audit* meningkat sebesar 0,190 maka pencegahan *fraud* juga

akan meningkat sebesar 0,190. Sebaliknya, jika *risk based internal audit* menurun sebesar 0,190 maka pencegahan *fraud* juga akan menurun sebesar 0,190. Dari hasil penelitian ini, dapat diinterpretasikan bahwa Direksi BPR yang memiliki pemahaman *risk based internal audit* yang tinggi akan lebih baik dalam upaya pencegahan kecurangan dibandingkan yang memiliki pemahaman *risk based internal audit* yang lebih rendah.

Pengaruh Whistleblowing Sytem terhadap Pencegahan Fraud

Whistleblowing system adalah bagian dari pengendalian perusahaan dalam mencegah bentuk-bentuk kecurangan, maka hal ini menjadi masalah kepengurusan perusahaan. Dengan demikian kepemimpinan dalam penyelenggaraan *whistleblowing system* disarankan berada pada Direksi, khususnya Direktur Utama. *Whistleblowing system* memastikan Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus menanganinya secara aman sekaligus timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem

pelaporan yang efektif. Hasil ini konsisten dengan penelitian Wardana et al. (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengendalian Internal, *Whistleblowing system* dan Moralitas Aparat terhadap Pencegahan Fraud.

Berdasarkan Tabel 8, besar nilai t hitung variabel *whistleblowing system* dengan nilai $\text{sig } 0,000 < \alpha (0,05)$ hal ini membuktikan bahwa hipotesis kedua yang diterima dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial variabel *whistleblowing system* (X2) terhadap pencegahan fraud. Dengan kata lain apabila *whistleblowing system* meningkat sebesar 0,382 maka pencegahan *fraud* juga akan meningkat sebesar 0,382. Sebaliknya, jika *whistleblowing system* menurun sebesar 0,382 maka pencegahan *fraud* juga akan menurun sebesar 0,382. Dari hasil penelitian ini, dapat diinterpretasikan bahwa BPR yang menerapkan *whistleblowing system* diperusahaannya akan lebih baik dalam upaya pencegahan kecurangan dibandingkan dengan BPR yang tidak menerapkan *whistleblowing system*.

Pengaruh Kesadaran Anti-Fraud terhadap Pencegahan Fraud

Kesadaran *anti-fraud* merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan

kesadaran mengenai pentingnya upaya pencegahan kecurangan oleh semua pihak dalam organisasi (Bank Indonesia, 2011). Menurut *Statement on Auditing Standard* mengungkapkan dimensi pengukuran yang digunakan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan, antara lain menciptakan dan memelihara budaya kejujuran dan etika yang tinggi, melaksanakan evaluasi atas proses *anti-fraud* dan pengendalian, serta mengembangkan proses pengawasan yang memadai (Sari & Laksito, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Nuryanto (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pengendalian internal, kesadaran *anti-fraud*, integritas, independensi, dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Berdasarkan Tabel 8, besar nilai t hitung variabel kesadaran *anti-fraud* dengan nilai $\text{sig } 0,004 < \alpha (0,05)$ hal ini membuktikan hipotesis ketiga yang diterima dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial variabel kesadaran *anti-fraud* (X3) terhadap pencegahan fraud. Dengan kata lain apabila kesadaran *anti-fraud* meningkat sebesar 0,265 maka pencegahan *fraud* juga akan meningkat sebesar 0,265. Sebaliknya, jika kesadaran *anti-fraud* menurun sebesar 0,265 maka pencegahan

fraud juga akan menurun sebesar 0,265. Dari hasil penelitian ini, dapat diinterpretasikan bahwa setiap elemen yang berada di BPR yang memiliki kesadaran anti-*fraud* yang tinggi cenderung akan lebih baik dalam upaya pencegahan kecurangan.

Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud

Good Corporate Governance merupakan sebagai tata cara kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stakeholder*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Indonesia mulai menerapkan konsep GCG sejak menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah percantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) berpendapat bahwa perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab yang menerapkan standar GCG yang telah diterapkan standar internasional (Adrian, 2011). Menurut *Forum for Governance in Indonesia*

(FCGI), *Good Corporate Governance* adalah seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*) sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dapat dikatakan sebagai suatu system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Fraud di Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan Tabel 8, besar nilai t hitung variabel penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan nilai $\text{sig } 0,016 < \alpha (0,05)$ yang berarti penolakan H_0 sehingga H_4 dapat diterima, sehingga penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. hal ini membuktikan bahwa hipotesis keempat yang diterima dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial variabel prinsip-prinsip *good corporate governance* (X4) terhadap pencegahan *fraud*. Dengan kata lain apabila prinsip-prinsip *good corporate governance* meningkat sebesar 0,340 maka pencegahan *fraud* juga akan meningkat sebesar 0,340. Sebaliknya,

jika prinsip-prinsip *good corporate governance* menurun sebesar 0,340 maka pencegahan fraud juga akan menurun sebesar 0,340. Dari hasil penelitian ini, dapat diinterpretasikan bahwa BPR yang menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik cenderung akan lebih baik dalam upaya pencegahan kecurangan dikarenakan didalam prinsip GCG terdapat elemen transparansi sehingga nasabah pada BPR dapat mengetahui hasil dari kinerja BPR.

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa Pemahaman *risk based internal audit* berpengaruh positif serta signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal Ini berarti bahwa direksi serta struktur organisasi BPR yang memiliki pemahaman *risk based internal audit* yang tinggi akan cenderung lebih baik dalam upaya pencegahan kecurangan dibandingkan yang memiliki pemahaman *Risk Based Internal Audit* yang lebih rendah.

Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan *Whistleblowing System* adalah bagian dari pengendalian perusahaan dalam mencegah bentuk-bentuk kecurangan.

bahasannya *whistleblowing system* berpengaruh positif serta signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal Ini berarti bahwa BPR yang menerapkan *whistleblowing system* di perusahaannya akan lebih baik dalam upaya pencegahan kecurangan dibandingkan dengan BPR yang tidak menerapkan *whistleblowing system*.

Bentuk pencegahan kecurangan lainnya adalah dengan menumbuhkan kesadaran *Anti-Fraud*. Penelitian ini mengungkap bahwa kesadaran *anti fraud* berpengaruh positif serta signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal Ini berarti bahwa setiap lingkungan BPR dengan struktur organisasi yang memiliki kesadaran *anti-fraud* yang tinggi cenderung akan lebih baik dalam upaya pencegahan kecurangan.

Faktor kunci lainnya yang menjadi pondasi dalam upaya pencegahan kecurangan dan penetaan kinerja organisasi adalah Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh positif serta signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Hal Ini berarti bahwa BPR yang menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik cenderung akan lebih baik dalam upaya pencegahan kecurangan.

Bagi perbankan khususnya BPR di Provinsi Bali, agar menerapkan

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara berkelanjutan, serta menerapkan *Whistleblowing System* secara bertingkat dari manajemen tingkat pertama hingga manajemen tingkat atas pada perusahaan dan tetap mempertahankan Kesadaran *Anti-Fraud* dan menambah Pemahaman *Risk Based Internal Audit* yang saat ini sudah berjalan dengan baik disamping itu penelitian selanjutnya dapat memasukan unsur-unsur keperilakuan ataupun perlakuan eksperimen dengan menambahkan unsur *non natural* seperti penambahan pemahaman dan pelatihan lainnya guna memperluas ruang lingkup dan wawasan penelitian yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*.

REFERENSI

- Adrian, S. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination*. Mason, USA: South Western, Cengage Learning.
- Alexander, C., & Cumming, D. (2020). *Corruption and Fraud in Financial Market: Malpractice, Misconduct and Manipulation*. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Azriani, Z., Harianto, & Nuryantono, N. (2008). Peranan Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Sumatera Barat. *Forum Pascasarjana*, 31(3), 173–188.
- Bank Indonesia. (2011). Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. *Governance*, K. N. K. C. 2004. *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, 1–17.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. New York: The Free Press.
- Dewi, R., Rozali, Y., & Mohammad, J. (2015). Pengaruh Pelaksanaan Risk Based Internal Auditing terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada Audit Internal Kantor Inspeksi Bank BRI Wilayah Bandung). *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan)*, 3(3), 831–836.
- Indriani, M., Yulia, A., Nadirsyah, N., & Ariska, L. P. (2019). Whistleblowing Intention, Personal Cost, Organizational Commitment and Fraud Seriousness Level. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 129–151. <https://doi.org/10.18196/jai.2002121>
- Jannah, S. F. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(2), 177–191. <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n2.p178-191>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (Whistleblowing System-WBS)*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Libramawan, I. P. (2014). *Pengaruh*

- Penerapan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Survey pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia So Bandung)*. Universitas Widyatama Bandung.
- Mayasari, M., Setiyanto, A. I., & Irawati, R. (2019). Pengaruh Faktor-faktor Individual terhadap Niat Melakukan Whistle-Blowing Internal dan Eksternal pada Akuntan Di Batam (Studi Kasus Politeknik Negeri Batam). *Jurnal Gama Societa*, 2(1), 48–53. <https://doi.org/10.22146/jgs.40425>
- Miller, G. P. (2017). *The Law of Governance, Risk Manajemen and Compliance* (Second ed.). New York: Wolters Kluwer.
- Nadia, F. A., Sukarmanto, E., & Purnamasari, P. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. *Prosiding Akuntansi: SPESIA (Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba)*, 4(2), 861–868. <https://doi.org/10.20885/jaai.vo117.iss1.art5>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Badan Perkreditan Rakyat. Retrieved January 13, 2020, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>
- Rudi. (2017). Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat dan Pengaruhnya terhadap Non Performing Loan (Study Kasus BPR di Kota Tangerang Selatan). *Jurnal Sekuritas: Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi*, 1(1), 59–77.
- Sari, D. N., & Laksito, H. (2014). Profesionalisme Internal Auditor dan Intensi Melakukan Whistleblowing. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3), 267–274.
- Saud, I. M. (2016). Pengaruh Sikap dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Whistleblowing Internal-Eksternal dengan Persepsi Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2), 209–219. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0056.209-219>
- Setianto, V. Y., Utami, I., & Novianti, S. (2016). Whistleblowing dalam Tekanan Ketaatan dan Kepercayaan pada Pimpinan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(3), 485–511. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i3.607>
- Sofia, A., Herawati, N., & Zuhdi, R. (2013). Kajian Empiris tentang Niat Whistleblowing Pegawai Pajak. *JAFFA*, 1(1), 23–38.
- Suginam. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus pada PT. Tolan Tiga Indonesia). *OWNER: Riset & JURNAL AKUNTANSI*, 1(1), 22–28.
- Suryono, E., & Chariri, A. (2016). Sikap, Norma Subjektif, dan Intensi Pegawai Negeri Sipil untuk Mengadukan Pelanggaran (Whistle-Blowing). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 13(1), 102–116.
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardana, I. G. A. K., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*,

8(2), 1–10.

- Wardani, C. A., & Sulhani. (2017). Analisis Faktor faktor yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing System di Indonesia. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(1), 29–44. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5255>
- Wulandari, D. N., & Nuryanto, M. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 4(2), 117. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.557>
- Zarefar, A., & Arfan, T. (2017). Efektivitas Whistleblowing System Internal. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 10(2), 25–33.